

Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro

Muhammad Miftahul Huda

Universitas Bojonegoro

miftahjatim@gmail.com

ABSTRAK

Konteks penelitian ini beraras pada tatakelola pemerintahan lokal yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bersama Masyarakat Sipil, untuk mendukung tatakelola pemerintahan lokal yang terbuka dan berkomitmen dalam keanggotaan Open Government Indonesia (OGI) dan menjadi salah satu *pilot project* keterbukaan pemerintahan terbuka dari 15 pemerintahan daerah lainnya di dunia. Sebagai *subnational pioneers* keterbukaan pemerintahan, Kabupaten Bojonegoro telah merumuskan dan menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai berikut; Revolusi Data, Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa, Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah, Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Untuk mengetahui apakah implementasi rencana aksi berlangsung efektif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan teori kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik, peneliti memilih pendekatan yang digunakan oleh Ripley (Ripley & Franklin, 1986: 11) sebagai alat bantu mengukur implementasi kebijakan tersebut, yang mengacu pada “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Temuan peneliti menunjukkan proses penyusunan RAD telah mengacu pada prinsip transparansi dan partisipatif sebagaimana prinsip OGP, namun komitmen-komitmen dalam RAD belum sepenuhnya berjalan efektif seperti, One Data Bojonegoro sebagai komitmen Revolusi data belum terwujud, 369 Desa belum mentransparansikan APBD Desa, Portal APBD online tidak bisa diunduh, perbub open kontrak belum sepenuhnya berjalan. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperluas partisipasi lebih luas dengan jaringan-jaringan NGO, Stakeholder dan memperkuat komitmen OPD yang menjadi penanggungjawab teknis RAD OGP. Perlu adanya jaminan keberlanjutan kebijakan dengan memasukkan RAD dalam perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD, RKPD dan APBD, Serta diperkuat melalui peraturan daerah.

Kata Kunci : Open Government Partnership, Transparansi, Partisipasi, Inovasi

ABSTRACT

The context of this research was related to the local governance that was initiated by the government of Bojonegoro Regency with Civil Society to support the local governance that was open and committed to the membership in Open Government Indonesia (OGI) and was one of the pilot projects of openness of the open government from 15 other local governments in the world. As a subnational pioneers of the government openness, Bojonegoro Regency has formulated and implemented the Regional Action Plan (RAD) as

follows; Data Revolution, Strengthening Village Government Accountability, Increasing Transparency of the Regional Budget system, Strengthening the Openness of Contract Documents for the Procurement of Goods and Services, and Improving the Quality of Public Services. To find out whether the implementation of the action plan is effective, this research used a qualitative-descriptive approach. The researcher used the approach of the theory of public policy, and for the implementation of public policy, the researcher chose the approach used by Ripley (Ripley & Franklin, 1986: 11) as a tool to measure the implementation of the policy, which refers to “compliance” and “factual” approach in the implementation of the policy. The finding of the researcher showed that the process of preparing the RAD has referred to the principles of transparency and participation as the OGP principle, but the commitments in the RAD have not been fully effective like One Data of Bojonegoro as a commitment of the data revolution that has not yet materialized, 369 Villages that have not been transparent about the Regional Government Budget (APBD) of the Village, the online APBD Portal that could not be downloaded, the regent regulations of the open contract that have not been yet fully operational. The researcher recommended that the Government of Bojonegoro Regency expands the wider participation with NGOs and stakeholders and strengthens the commitment of the Regional Device Organization (OPD) which is the technical responsibility of the RAD OGP. It is necessary to guarantee the sustainability of the policy by including RAD in the regional development planning both RPJMD, RKPD and APBD, as well as strengthening through the local regulation.

Keywords: *Open Government Partnership, Transparency, Participation, Innovation*

A. PENDAHULUAN

Berawal dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima undangan diskusi Open Government Partnership (OGP) di hotel pullman Jakarta pada 8 Oktober 2015. Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia di dalam program OGP pada skala pemerintahan daerah (Sub-national Government). Keterpilihan Kabupaten Bojonegoro bersama kota Seoul (Korea Selatan) dan kota Tbilisi (Georgia) bersanding dengan 13 kota besar di dunia sebagai daerah percontohan yang menerapkan praktek keterbukaan pemerintah daerah.

Program OGP di inisiasi pada tanggal 20 September 2011 di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB oleh delapan Kepala negara yaitu Indonesia, Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina,

Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat melalui persetujuan bersama Deklarasi Keterbukaan Pemerintah. Selain konsep membangun pemerintahan yang terbuka berbasis kepada tiga aspek utama yaitu transparansi, partisipasi publik dan inovasi, OGP juga beraras pada tatakelola publik yang sinergis dengan masyarakat sipil dan organisasi publik lainnya. Program ini berkorelasi positif dengan agenda Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK, Sustainable Development Goal's (SDGs) dan agenda-agenda demokratisasi di Indonesia yang telah menapaki usia 18 tahun.

Bupati Bojonegoro tanggal 24 Februari 2016 melalui surat nomor : 489/0109/ 412.45/2016, yang memperkuat dua NGO, BI dan IDFoS. Mengirimkan kesanggupan kepesertaan sebagai pemerintahan terbuka tahun 2016 kepada

Tim Kementerian PPN/ Bappenas Sekretaris Nasional Open Government Indonesia (OGI). Selanjutnya setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga Open Government Partnership (OGP), Tim OGP tanggal 8 April 2016, menyatakan Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai salah satu pilot project keterbukaan pemerintahan terbuka dari 15 pemerintahan daerah lainnya di dunia.

Keterpilihan Kabupaten Bojonegoro sebagai pelopor program OGP berbasis pemerintahan lokal menunjukkan adanya kemauan inovasi kuat dari pemerintah lokal untuk melakukan reformasi dan transformasi birokrasi serta tata kelola pemerintah yang terbuka. Kabupaten Bojonegoro dianggap telah merintis jalur tersebut melalui serangkaian kebijakan pemerintah lokal dengan membangun pondasi-pondasi berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi di berbagai sektor pelayanan publik.

Kebijakan pemerintah Bojonegoro tersebut diantaranya adalah Forum Jumat, dialog publik antara bupati dengan masyarakat yang digelar secara rutin setiap Jumat di Pendopo Kabupaten Bojonegoro, publikasi anggaran dana desa di ruang publik, serta pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publikasi informasi. Hal ini tentu bukan perkara mudah, karena latar belakang ekonomi sosial kemasyarakatan yang bergelut dengan angka kemiskinan yang masih tinggi dan serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Persoalan tersebut justru menjadi stimulan untuk membangun tatakelola pemerintahan lokal yang terbuka.

Sebagai subnational pioneers keterbukaan pemerintahan di tingkat lokal di Indonesia, Kabupaten Bojonegoro merumuskan rencana aksi daerah

(RAD), Rencana aksi OGP inilah yang menjadi Fokus penelitian. sebagaimana berikut :

1. Revolusi Data
2. Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa
3. Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah
4. Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

B. LANDASAN TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna

pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

2. Pemerintahan Lokal

Demokrasi, menurut Dahl, harus dilihat sebagai proses politik yang membuka peluang bagi partisipasi politik rakyat untuk secara efektif melakukan pengawasan terhadap agenda dan keputusan politik. Pendapat serupa juga dikemukakan Holden di dalam demokrasi rakyat diberikan hak membuat keputusan (dalam bentuk kebijakan publik) menyangkut masalah-masalah penting. Pendapat Dahl dan Holden sangat relevan dalam konteks demokratisasi di Indonesia baik pada tingkat nasional maupun lokal, yang memberikan peluang peranan atau partisipasi politik rakyat untuk mengawal agenda reformasi, karena, seperti dikemukakan Huntington dan Nelson, partisipasi politik rakyat merupakan salah satu tolok ukur penting untuk menilai apakah suatu sistem politik itu demokratik, otoriter, atau bentuk sistem politik lainnya, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Hal terpenting yang memaknai terselenggaranya pemerintahan lokal yang demokratis adalah konsep pemerintahan yang otonom (self-government) serta pemerintahan yang paling menyentuh masyarakat. Gagasan terpentingnya adalah penduduk suatu wilayah harus mendapatkan hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan menyangkut isu-isu yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka dan yang untuk itu

mereka mampu mengambil keputusan. Ada dua cara untuk memahami demokrasi lokal, yakni: lembaga-lembaga pemerintahan lokal seperti Bupati, DPRD, komite-komite, dan pelayanan administratif serta di dalam pengorganisasian dan masyarakat sipil (civil society).

Idealnya, para pejabat lokal dan gerakan-gerakan masyarakat madani bekerja sama dalam hubungan yang saling memperkuat dan mendukung untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, serta mencari solusi yang inovatif.

Konteks penelitian ini akan berfokus pada tatakelola pemerintahan lokal yang digagas oleh lembaga eksekutif di Kabupaten Bojonegoro melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerjasama dengan civil society di Kabupaten Bojonegoro. Untuk mendukung korelasi tatakelola pemerintahan lokal dan demokrasi, Timothy D. Sisk dan beberapa akademisi seperti Julie Ballington, Pran Chopra, John Stewart, David Storey dan lain-lain menggagas konsep-konsep inti yang membedah demokrasi lokal.

3. Open Government Partnership (OGP)

OGP hadir untuk menjawab tantangan tersebut. OGP merupakan sebuah gerakan global yang bertujuan untuk menyediakan kerangka bagi pemangku kepentingan di negara anggota untuk mendorong terbangunnya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu OGP juga mendorong pemanfaatan inovasi teknologi terkini untuk memudahkan proses penyelenggaraan pemerintah. Inisiatif ini diluncurkan pada tanggal 20 September 2011 oleh delapan negara: Indonesia,

Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Pemerintah tidak hanya didorong untuk dapat transparan, akuntabel, dan inovatif, namun juga dapat berkolaborasi dengan masyarakat sipil serta masyarakat luas. Semangat ini pun semakin menular ke berbagai negara hingga akhir September tahun 2016, sudah terdapat 70 negara yang tergabung dalam OGP.

Konteks penelitian ini mengacu pada gagasan OGP yang ditransformasikan di level pemerintahan lokal. Di tahun 2017, gagasan ini merupakan yang pertama sebagai stimulan untuk membangun tatakelola pemerintahan yang terbuka, inovatif dan berbasis partisipasi publik yang berarar pada lokalitas. Seperti yang telah di jelaskan di atas, Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai proyek percontohan pemerintahan daerah di Indonesia yang menggagas tatakelola pemerintahan daerah berbasis transparansi, partisipasi publik dan inovasi.

Proses selanjutnya, Kabupaten Bojonegoro akan mendapatkan pendampingan dari Sekretariat OGP untuk menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD). RAD ini berisikan sejumlah komitmen untuk memperkuat gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah yang sudah ada. Penyusunan RAD akan dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil dan organisasi publik lainnya. Salah satu prasyaratnya, pemerintah daerah harus membuka proses pemantauan pencapaian RAD melalui proses konsultasi publik.

C. METODE

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode ini bersifat pemaparan dalam rangka

menggambarkan tentang Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro sesuai konteks penelitian ini. Untuk mengetahui apakah implementasi rencana aksi OGP di Kabupaten Bojonegoro berlangsung efektif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan teori kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan yang digunakan oleh Ripley (Ripley & Franklin, 1986: 11) sebagai alat bantu mengukur implementasi kebijakan tersebut, yang mengacu pada “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Implementasi OGP di Kabupaten Bojonegoro

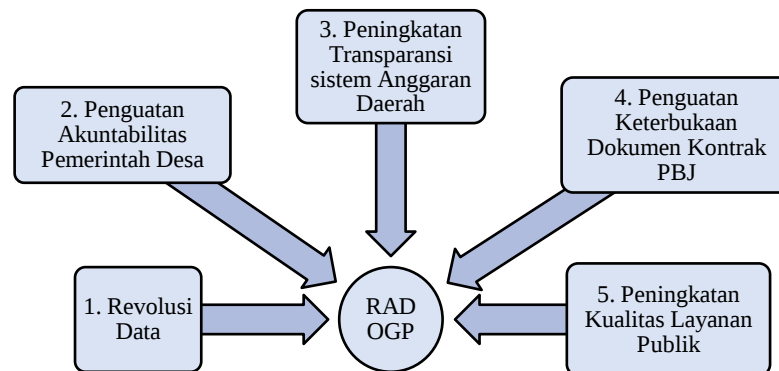
Proses Implementasi Open Government Partnership (OGP) dimulai saat Bupati Bojonegoro, pada tanggal 24 Februari 2016 melalui surat nomor: 489/0109/ 412.45/2016, yang memperkuat dua NonGovernment Organisation (Ngo) yakni Bojonegoro Institute (BI) dan IDFoS Indonesia, mengirimkan kesanggupan kepesertaan sebagai pemerintahan terbuka tahun 2016 kepada Tim Kementerian PPN/ Bappenas Sekretaris Nasional Open Government Indonesia (OGI). Selanjutnya setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga Open Government Partnership (OGP), Tim OGP tanggal 8 April 2016, menyatakan Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai salah satu pilot project keterbukaan pemerintahan terbuka dari 15 pemerintahan daerah lainnya di dunia.

Sebagai *subnational pioneers* keterbukaan pemerintah yang tergabung dalam OGP di tingkat lokal di Indonesia, Kabupaten Bojonegoro merumuskan dan

menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang harus dilakukan pada tahun 2016-

2017, dengan rencana aksi daerah sebagaimana gambar 1 berikut;

**Gambar 1;
Rencana Aksi Daerah OGP Kabupaten Bojonegoro**



Sumber: Kominfo, Dinas Menuju Gerbang Dunia, Pemerintah Terbuka Rakyat Bahagia

Lima Rencana Aksi Daerah Kabupaten Bojonegoro di atas diapresiasi oleh TIM OGP Nasional dan dianggap sangat ambisius, RAD di atas bisa dijadikan pilot percontohan Keterbukaan Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Proses penyusunan lima Rencana Aksi Daerah OGP Kabupaten Bojonegoro tahun 2016-2017 sebagaimana gambar di atas dirumuskan dengan mengacu pada prinsip partisipatif, dimana pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro menyusun rencana aksinya dengan melibatkan stakeholder, sebagaimana prinsip OGP adalah adanya *partnership* atau kolaborasi antara pemerintah dengan Stakeholder dalam proses tata kelola pemerintahan.

1.1. Revolusi Data

Revolusi Data yang bertujuan untuk pengembangan data real time terintegrasi, yang dikumpulkan oleh “Dasa Wisma” (kelompok 10 orang,) dengan ketersediaan data terintegrasi, *real time*, dan terverifikasi dalam aplikasi Dasa Wisma yang tergabung ke dalam portal data.go.id akan memfasilitasi akses dan pemanfaatan data yang lebih baik oleh

semua pihak dalam pengambilan keputusan. Komitmen ini memperkuat tata kelola data pemerintahan desa ke arah “One Data Bojonegoro”, terintegrasi keportal nasional data.go.id, yang akan memperkuat praktik pemerintahan terbuka di Bojonegoro.

Dinas Komininfo Kabupaten Bojonegoro, sebagai penanggungjawab program menjalankan komitmen ini sudah melatih ketua PKK dua anggota dasa wiswa dari 430 desa. Pelatihan itu untuk mempersiapkan anggota Dasa Wisma dalam mengumpulkan data. namun proses entri data hanya berjalan sampai pada 65% karena kendala geografis dan budaya, proses verifikasi dilakukan dengan sangat terbatas menurut Joko Hadi Purnomo dari IDFoS, “target pemerintah untuk mencakup semua desa terlalu banyak sehingga pemerintah tidak mampu menyelesaikan target pendataan yang dilakukan oleh dasa wisma. Data terkumpul tersebut juga belum bisa dipublikasikan keportal nasional data.go.id dengan “Dashboard PKK”, terkendala jenis data yang dikecualikan

karena memuat *by name by address* masyarakat. Praktis hingga saat ini One Data Bojonegoro sebaga data kelola data desa yang terintegrasi, *real time*, dan terverifikasi belum dapat terwujud.

1.2. Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa

Rencana aksi daerah melalui Penguatan akuntabilitas Pemerintah Desa bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka, akuntabel, dan transparan, serta pengembangan kapasitas masyarakat desa. Upaya yang dilakukan dengan cara meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa dan kapasitas masyarakat, dengan membuka perencanaan dan proses penganggaran, data aset desa dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam setiap siklus pengambilan keputusan di desa. Harapan dari pelaksanaan rencana aksi daerah ini, Pemerintah desa yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab serta mendukung upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah desa.

Bupati Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan instruksi No 2/2016 untuk mendorong pemerintah desa untuk mengimplementasikan komitmen OGP dan mempublikasikan rencana anggaran

mereka (APBDes) dan laporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa diinstruksikan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat desa malui Baner yang dipampang ditempat2 strategis Desa, maupun di Web Desa.

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan dua Organisasi Masyarakat Sipil yakni Bojonegoro Institute dan IDfos membuat indek transparansi Desa dilaporkan bahwa dari jumlah 419 Desa di Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan transparansi keterbukaan informasi baru bisa dijalankan di 50 desa dan 369 desa belum menjalankan keterbukaan informasi publik, dengan dibagi kriteria desa terbuka berjumlah 7 Desa, Desa menuju terbuka sebanyak 31 Desa, dan Desa kurang terbuka ada 12 Desa sementara Desa dengan Kategori belum terbuka masih sebanyak 369 Desa. dengan indikator transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inovasi. Organisasi Masyarakat Sipil, IDfos memegang peranan penting dalam mendorong penguatan akuntabilitas pemerintah desa melalui sekolah desa yang selama ini dilakukan dengan kerjasama dengan perusahaan migas EMCL malui dana skema CSR.

Tabel 1; Desa Terbuka Open Government Partnership Di Kabupaten Bojonegoro

No	Desa	Kecamatan	Transparansi	Akuntabilitas	Partisipasi	Inovasi	Nilai
1.	Pejambon	Sumberejo	25,01	29,06	23,2	16,87	90,20
2.	Kauman	Bojonegoro	24,03	28,14	22,3	15,45	88,24
3.	Tlogorejo	Kepohbaru	23,41	27,98	21,9	14,98	86,32
4.	Mojodeso	Kapas	21,01	27,05	21,3	13,97	83,33
5.	Deru	Sumberejo	21,23	26,25	21,1	13,65	82,23
6.	Sukoharjo	Kalitidu	16,9	28,65	21,7	12,26	79,51
7.	Kandangan	Trucuk	21,99	23,75	19,08	12,52	77,34

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro 2018

Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo dari 7 Desa yang dinyatakan

sebagai desa terbuka dalam penilaian festival transparansi Desa telah memenuhi

kelengkapan publikasi informasi pembangunan desa, mengumumkan APBDesa, RPJMDesa, Profil Desa, Hasil Pembangunan, Akurasi data informasi dan sudah memiliki SOP Layanan Informasi sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. Informasi disampaikan oleh desa pejambon baik melalui Banner, Web Desa dan Media Sosial. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Pejambon, bahwa yang selama ini mendapatkan pendampingan secara intensif oleh Dinas Komunikasi dan Informasi mendapatkan juara transparansi Desa tingkat Nasional. Sementara Desa-desanya lainya yang belum terbuka hanya menyampaikan informasi melalui banner APBDesa secara umum belum detail dan hanya mengetahui tentang surat intruksi bupati dan tidak mengetahui informasi lebih jauh soal apa yang dimaksud dengan OGP, hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat desa semakin kecil dengan rendahnya komitmen pemerintah desa untuk menyampaikan informasi khususnya pengelolaan anggaran desa.

1.3. Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah

Rencana aksi daerah Kabupaten Bojonegoro melalui peningkatan transparansi sistem anggaran daerah bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem anggaran daerah dan memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui kebijakan fiskal yang transparan sesuai dengan UU KIP Indonesia nomor 14 tahun 2008. Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk melibatkan empat kelompok pemangku kepentingan dalam masyarakat (akademisi, sektor swasta, pemerintah dan masyarakat) dalam setiap siklus pembuatan kebijakan mulai dari, perencanaan, implementasi hingga

pelaporan. Komitmen ini dilakukan melalui :

- a. Publikasi ringkasan anggaran Kabupaten Bojonegoro (APBD) di situs web BPKAD berdasarkan informasi publik prinsip keterbukaan
- b. Bojonegoro menjadi tuan rumah Festival OGP
- c. Publikasi rencana kerja pemerintah (RKPD) dan anggaran daerah (APBD)
- d. Publikasi rincian anggaran Bojonegoro (APBD) dari masing-masing unit kerja (OPD) melalui web / informasi OPD layanan (PPID)

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kusnandoko, kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro, bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi di atas dilakukan melalui Web pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Penelusuran peneliti menemukan bahwa data informasi di atas telah disampaikan di <http://bpkad.bojonegorokab.go.id> kecuali Dokumen rincian RKA dan rincian DPA yang tidak dicantumkan didalamnya. Ada perubahan mendasar dari tahun-tahun sebelumnya dimana dulunya data anggaran daerah tersebut berupa dokumen Pdf yang bisa di download namun saat peneliti melakukan penelusuran data dokumen anggaran di web tersebut tidak lagi bisa di download hanya bisa dilihat.

Menurut AW Syaiful Huda, APBD online yang hanya bisa dilihat tapi tidak bisa diunduh ini merupakan kemunduran komitmen pemerintah daerah dalam mentransparansikan anggaran Kabupaten Bojonegoro. Bahkan uji akses rincian RKA dan DPA 2016-2017 yang dilakukan oleh Bojonegoro Institute pada beberapa OPD di Kabupaten Bojonegoro

tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dimana BI tidak mendapatkan dokumen sesuai dengan permintaan yang dilakukan tidak, meski masing-masing OPD sudah memiliki Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana UU Nomor 14 tahun 2008.

1.4. Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Rencana aksi daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang memungkinkan data kontrak pengadaan dibuka untuk umum disesuaikan dengan UU No. 14 tahun 2008, hal diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pengadaan barang dan jasa yang disediakan dan meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan pengadaan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk mengembangkan aplikasi yang memungkinkan sistem pengadaan di Kabupaten Bojonegoro lebih transparan karena kegiatan pengadaan yang ada sangat rentan terhadap korupsi. Inovasi dalam keterbukaan dokumen kontrak / kebijakan pengadaan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keseluruhan kegiatan pengadaan.

Melalui aplikasi ini, dapat meningkatkan pengawasan publik dan partisipasi publik sepanjang siklus pengadaan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rencana aksi daerah ini mencanangkan kegiatan sebagai berikut;

- a. Penerbitan deklarasi kesiapan Bojonegoro untuk memulai Keterbukaan dokumen kontrak
- b. Penerbitan Peraturan Bupati tentang Kontrak Terbuka

- c. Ketersediaan prototipe aplikasi kontrak data terbuka
- d. Implementasi aplikasi kontrak data terbuka

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menjalankan komitmen kegiatan di atas pada tanggal 11 Oktober 2016, telah mengadakan deklarasi Open Dokumen Kontrak, Naskah Deklarasi ini yang ditandatangani oleh 32 orang, dari Instansi Pemerintah daerah, DPRD, Kepolisian, Pihak Swasta dan perwakilan OMS lokal. Kemudian, pada 1 November 2016 bupati mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2016 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diperbaharui pada tanggal 5 Januari 2017 mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak dan dirubah melalui peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2017.

Peraturan ini memberikan standar dan pedoman kepada OPD di lingkungan pemerintah Bojonegoro bahwa keterbukaan dokumen kontrak dilakukan sejak proses kontrak, dari perencanaan kegiatan, penganggaran, pengadaan barang & jasa, pelaporan dan menyediakan akses publik untuk berpartisipasi. Semua kontrak pemerintah akan diterbitkan terdiri dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) baik KAK usulan rencana kegiatan maupun KAK pelaksanaan kegiatan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses pemilihan penyedia barang dan jasa / Kontraktor, alasan pemenang, profil penyedia barang, kontrak pengadaan, pemantauan SKPD, partisipasi masyarakat, proses pembayaran dan pencatatan aset. dan mengizinkan komentar publik dibuat aplikasi online.

Hingga akhir 2017 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum juga

membuat Aplikasi Online yang dituangkan dalam peraturan dengan alasan tidak penganggaran untuk hal tersebut, baru pada tahun 2018, Bojonegoro Institute kemitraan dengan Donor internasional Hivos membuat aplikasi Web <http://bos.bojonegorokab.go.id/>, dari link tersebut, penelusuran peneliti mendapatkan informasi proyek dan besaran anggarannya namun belum memuat sepenuhnya Janis informasi yang di mandatkan sesuai Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak. Beberapa Jenis dokumen seperti Dokumen kontrak, Kerangka Acuan Kerja (KAK) baik KAK usulan rencana kegiatan maupun KAK pelaksanaan kegiatan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dokumen study kelayakan tidak ikut dipublikasi. Bojonegoro Institute yang masuk dalam tim OGP dari dana mandiri juga membuat aplikasi <https://siipp.net/> untuk memantau proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan konten yang lebih partisipatif dimana masyarakat memungkinkan untuk memberikan informasi, memantau dan melaporkan proyek yang terjadi disekitar mereka.

1.5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Rencana aksi daerah OGP kelima Kabupaten Bojonegoro melalui peningkatan kualitas layanan publik, Komitmen dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan evaluasi standar pelayanan publik yang dikembangkan bersama dan disepakati oleh pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat setempat sebagai penerima manfaat pelayanan di dua puskesmas atau biasa disebut dengan maklumat pelayanan (kontrak pelayanan/citizen charter).

Rencana aksi daerah OGP kelima Kabupaten Bojonegoro dilakukan melalui aksi kegiatan sebagai berikut;

- a. Implementasi Evaluasi Standar Layanan Publik (SPP)
- b. Pengembangan standar pelayanan publik yang disetujui bersama oleh pegawai pemerintah daerah dan oleh masyarakat di 2 (dua) pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas)
- c. Penerapan Standar Layanan Publik yang melibatkan partisipasi aktif dari warga setempat
- d. Penerapan Standar Layanan Publik yang telah disetujui bersama oleh Pegawai pemerintah daerah dan oleh masyarakat di 2 (dua) pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas)

Implementasi Evaluasi Standar Layanan Publik (SPP), dilakukan oleh pemerintah kabupaten bojonegoro dengan mengontrak konsultan swasta PT KOKEK untuk merancang dan melakukan survei kepuasan masyarakat di dua fasilitas kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan tujuan memahami bagaimana layanan diberikan. Survei ini dilakukan pada November 2016, PT KOKEK melakukan survei di puskesmas yang berlokasi Kedungadem dan Malo.

Sementara komitmen dalam rencana aksi yang ke 2 dan 4 dilakukan di puskesmas Gayam dan Pungpungan. Menurut perwakilan IDFOs, kurangnya memadai dukungan finansial oleh karenanya kedua kecamatan ini kemudian dipilih dengan memanfaatkan dana CSR dari Exxon Mobile/EMCL. Sebelum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi pilot proyek OGP, IDFOs sudah mendampingi beberapa mengembangkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui maklumat pelayanan puskesmas di wilayah kecamatan gayam dan sekitarnya,

kecamatan tersebut merupakan wilayah terdampak Industri ekstraktif Migas EMCL dan yang dilewati oleh pipa EMCL.

Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan IDfos yang juga aktif sebagai anggota tim OGP Kabupaten Bojonegoro, mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Gayam dan Pungungan, IDfos menyelenggarakan serangkaian acara di Gayam dan Pungungan sepanjang 2017 sebagai bagian dari program Mama Asih, dibiayai oleh Exon Mobile untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Program Mama Asih (Maklumat Bersama untuk Layanan Bersih)

2. Respon masyarakat terhadap implementasi OGP di Kabupaten Bojonegoro

Setelah satu tahun rencana aksi daerah berjalan, tim OGP baru pada tanggal 18 Mei 2017 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk tim pengarah, tim pelaksana teknis, dan tim evaluasi OGP Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 melalui SK Bupati Kabupaten Bojonegoro nomor 188/177/KEP/412.013/2017. Hal ini disayangkan oleh Joko Hadi Purnomo Direktur IDfos, sebagaimana prinsip OGP sejak awal harus ada kolaborasi tata kelola pemerintahan, meski terlambat keanggotaan tim OGP sudah melibatkan stakeholder yang terdiri dari unsur pemerintah daerah yakni pejabat OPD terkait, Ngo yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro, serta dari pihak Akademisi, tim inilah yang mendapatkan mandat untuk memastikan tercapainya target lima rencana aksi OGP Kabupaten Bojonegoro. Selain keputusan pembentukan tim OGP, SK Bupati tersebut juga menyatakan bahwa segala

biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas tim OGP dibebankan pada APBD Kabupaten Bojonegoro.

Namun temuan peneliti sebagaimana disampaikan oleh Joko Hadi Purnomo yang juga sebagai anggota tim evaluasi OGP menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan program rencana aksi OGP tidak disertai dengan kebijakan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Bojonegoro baik untuk pelaksanaan rencana aksinya maupun untuk tim OGP daerahnya. Hal tersebut menyebabkan implementasi OGP kurang dapat berjalan secara optimal baik pelaksanaan RAD maupun tim OGP, IDfos dalam menginisiasi rencana aksi daerah tentang peningkatan pelayanan publik khususnya maklumat pelayanan khususnya bidang kesehatan di puskesmas sudah berjalan dari sebelum ada OGP dicanangkan dengan menggunakan anggaran IDfos sendiri dan melalui kerjasama dengan Perusahaan Migas EMCL. Kebijakan yang baik semestinya disertai komitmen kebijakan penganggaran oleh pemerintah daerah.

Tidak adanya nomenklatur anggaran belanja tim OGP dalam APBD tersebut juga dibenarkan oleh Direktur Bojonegoro Institute AW. Syaiful Huda, Bojonegoro Institute dalam mengawal implementasi OGP khususnya rencana aksi Revolusi data dan Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa bermitra dengan Donor Internasional seperti Hivos dan Ford Foundation. Selain komitmen kebijakan anggaran, Rencana Aksi Daerah OGP seharusnya dimasukkan dalam rencana kebijakan pembangunan Daerah baik dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta

diperkuat dalam Peraturan Daerah, Tidak hanya diatur dalam peraturan dan intruksi Bupati. Hal tersebut dapat menjamin keberlanjutan implementasi OGP meski ada pergantian kepemimpinan daerah.

Diakui oleh Kusnandaka Tjatur P. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro, bahwa secara khusus tidak ada nomenklatur belanja tim maupun belanja pelaksanaan rencana aksi OGP namun kegiatan tim seperti pertemuan rapat maupun pelaksanaan rencana aksi daerah dilakukan dengan menggunakan anggaran operasional dan belanja program OPD terkait.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Proses penyusunan lima Rencana Aksi Daerah OGP Kabupaten Bojonegoro telah dirumuskan dengan mengacu pada prinsip partisipatif, dengan melibatkan stakeholder pemerintah daerah sebagaimana prinsip OGP adalah adanya *partnership* atau kolaborasi antara pemerintah dengan Stakeholder dalam proses tata kelola pemerintahan. Namun TIM OGP disusun setahun setelah RAD dirumuskan. Namun dari 50 orang tim yang dibentuk yang mewakili masing unsur instansi dan stakeholder, hanya Dinas Komunikasi dan Informasi, Bojonegoro Institute dan ID Fos yang sangat aktif.
- b. Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Open Government Partnership (OGP) Di Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan namun belum sepenuhnya komitmen-komitmen dalam RAD terwujud. Lima komitmen Rencana Aksi Daerah yang sudah dirumuskan secara partisipatif dengan melibatkan Ngo yakni Bojonegoro Institute dan ID Fos didukung oleh

komitmen Bupati yang menjabat saat itu namun pelaksana baik ditingkat OPD maupun Pemerintah Desa belum dapat sepenuhnya menjalankan rencana aksi yang disepakati Bersama Ngo ditingkat lokal, revolusi data yang belum selesai di input dan belum dipublikasi, 369 Desa belum terbuka, adanya keengganan OPD untuk membuka sepenuhnya dokumen APBD khusus RKA dan DPA dan APBD online yang hanya bisa dilihat tapi tidak bisa diunduh, bahkan perbub open kontrak belum sepenuhnya berjalan, Dokumen KAK, HPS yang seharusnya dipublikasi belum dilakukanserta kegiatan peningkatan pelayanan publik masih belum sepenuhnya dari dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

- c. Rencana Aksi Daerah belum masuk dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD, RKPD maupun secara khusus dalam nomenklatur APBD, Serta komitmen kebijakannya belum kuat karena hanya sebatas peraturan dan intruksi Bupati

2. Rekomendasi

- a. *Partnership* atau kolaborasi antara pemerintah dengan Stakeholder dalam proses tata kelola pemerintahan perlu memperluas dukungan dan partisipasi tim OGP yang lebih inklusif dari jaringan-jaringan Ngo, Stakeholder pemerintahan yang lebih luas dan memperkuat komitmen OPD yang masuk dalam TIM teknis OGP untuk menjalankan rencana aksi yang sudah disepakati bersama.
- b. Perlu memperkuat komitmen dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator target capaian Rencana Aksi Daerah Open Government Partnership (OGP) Di Kabupaten Bojonegoro, khususnya

- oleh masing-masing OPD yang menjadi penanggungjawab program kegiatan,
- c. Upaya mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator target capaian rencana Aksi Daerah dimasukkan dalam Dokumen

perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD, RKPD maupun secara khusus dalam nomenklatur APBD, Serta komitmen kebijakannya diperkuat melalui peraturan daerah sehingga menjamin kepastian keberlanjutan kebijakan OGP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bohman, James dan William Rehg (eds), 1999. *Deliberative Democracy; Essays on Reason and Politics*. London: MIT Press.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Creswell, John W, 1994. *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approaches*, Sage Publication, 1994.
- Dahl, Roberth, 1999. *On Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- De Asis, Maria Gonzales, 2000. *Coalition Building to Fight Corruption, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit*. (World Bank Institute)
- Denhardt, Janet V dan Robert B. Denhardt, 2003. *The New Public Service: Serving, not Steering*. Armonk, New York: M.E Sharpe.
- Dwiyanto, Agus., dkk. 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Elster, Jon, 1999. *Deliberative Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hardiman, Franco Budi, 2009. *Demokrasi Deliberasi; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Holden, Barry. *Understanding Liberal Democracy*. New York: Harvester Wheatsheaf, 1993.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kominfo, Dinas Menuju Gerbang Dunia, Pemerintah Terbuka Rakyat Bahagia
- Maatew, Miles B dan Michael Huberman, 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Marsh, David dan Gerry Stoker, 2002, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Jakarta : Nusa Media.
- Nino, Carlos Santiago, 1996. *The Constitution of Deliberative Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. *Reinventing Government; Mewirauahakan Birokrasi: Sepuluh Prinsip untuk Mewujudkan Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: PPM Press, 2003.
- Soepeno, 1997, *Statistik Terapan Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial & Pendidikan* . Jakarta: Rineka cipta.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Suryani, Tatik, 2008. *Perilaku Konsumen; Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Surabaya: Graha Ilmu.

Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Thoha, Miftah, 2009. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Al Azhar, Muchtar Lutfi Malik., Imam Hardjanto., Minto Hadi. (2012). Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Publik (Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5, (Hal: 1048-1057).

Fanar Syukri, Agus. (2007). Tinjauan Sosio Teknologi Atas Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Jembrana Bali. *Jurnal Standarisasi* Vol.9 No. 2. (Hal: 69 – 75).

Yuliani, Sri. (2007). *New Public Service: Mewujudkan Birokrasi yang Pro-Citizen*. *Jurnal Spirit Publik-Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip UNS* Vo.3 No.1 .

Policy Papper

Denhardt, Roberth B. dan Janet V. Denhardt. 2000. “The New Public Service: Service Rather than Steering”. *Public Administration Review* 60.

Denhardt, Roberth B. dan Janet V. Denhardt. 2003. “The New Public Service: An Approach to Reform”. *International Review of Public Administration* 8.

Rondinelli, Dennis dan Nellis, J., “Assessing Decentralization Policies: A Case for Cautious Optimism”, *Development Policy Review IV*, 1, 1986.

Tesis

Kusuma, Candra. *Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Forum Konstituen di Kabupaten Bandung*. *Tesis Program Studi Magister Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia*. Jakarta, 2012.

Dokumen Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. *Bojonegoro dalam Angka 2016*. Bojonegoro: BPS, 2016.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014 dan 2016*. Jakarta, Pelangi Grafika: 2014 dan 2016.

Timothy D. Sisk, et al. *Demokrasi di Tingkat Lokal*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Stockholm: Publication Office, 2002.

UNDP, *Decentralized Governance Monograph: A Global Sampling of Experiences*. Management Development and Governance Division. Bureau for Policy Development, April 1998.

Situs Online

<http://opengovpartnership.org/> Dikunjungi
laman ini pada tanggal 1 Agustus 2019.

<http://opengovindonesia.org/> Dikunjungi
laman ini pada tanggal 4 Agustus 2019
<http://www.jpip.or.id/> Dikunjungi laman
ini pada tanggal 4 Agustus 2019